



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

**TRIWULAN I
TAHUN 2020**

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, April 2020**

KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, April 2020

INSPEKTUR JENDERAL

ARUS GUNAWAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal.....	1
I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program.....	1
I.3. Struktur Organisasi	2
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	9
II.1. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2020	9
II.2. Indikator Kinerja Program / Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2020.....	10
II.3. Rencana Aksi Program Inspektorat Jenderal Tahun 2020	11
II.4. Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020	12
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	19
III.1. Hasil yang Telah Dicapai	19
III.2. Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran	24
III.3. Analisis Capaian Kinerja	27
III.4. Hambatan dan Kendala	37
III.5. Langkah Tindak Lanjut.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	10
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020	10
Tabel 3. Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020.....	12
Tabel 4. Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan I.....	19
Tabel 5. Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat I Triwulan I.....	20
Tabel 6. Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat II Triwulan I.....	21
Tabel 7. Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat III Triwulan I.....	22
Tabel 8. Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat IV Triwulan I	22
Tabel 9. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	23
Tabel 10. Capaian Kinerja	31
Tabel 12. Progres Capaian Rencana Aksi TW I.....	40

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2020 dengan didasarkan pada rencana strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 serta untuk mewujudkan:

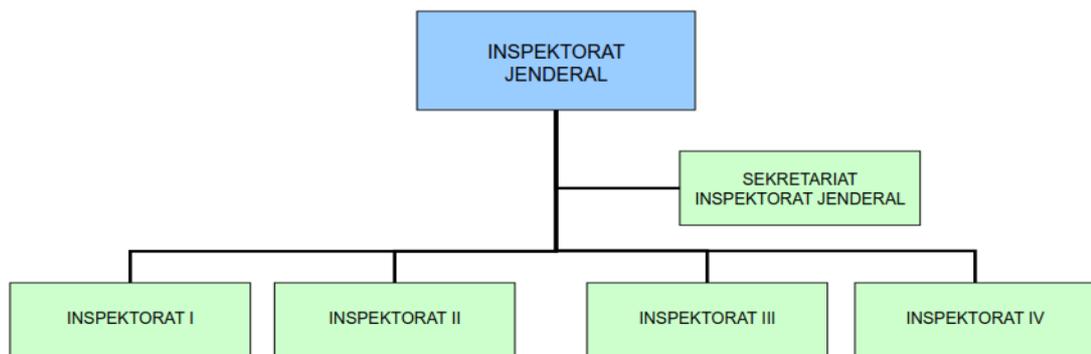
1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, yaitu Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *post audit*, tetapi juga sebagai penjamin mutu (*Quality Assurance*) dan mitra konsultasi (*Consulting Partner*) kegiatan unit kerja;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; dan
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

I.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan;

- Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi; dan
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :



Gambar 2 Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Program menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Bagian Program, Monitoring, dan Evaluasi terdiri dari :

- 1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.

- 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.
- b. Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.

Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, terdiri dari :

- 1) Subbagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan.
 - 2) Subbagian Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.
- c. Bagian Keuangan dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik negara.
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi.

Bagian Keuangan dan Umum, terdiri dari :

- 1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik negara.

- 2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi.
- d. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai;
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksanaan serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi terdiri dari :

- 1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai.
- 2) Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

2) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

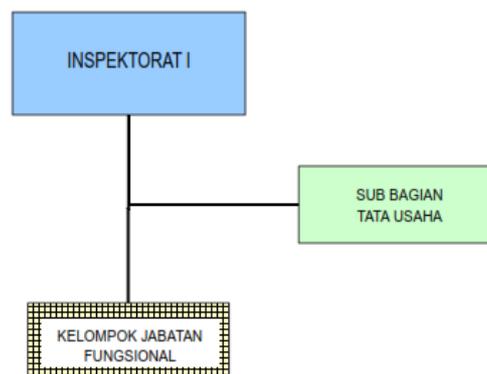
1. Subbagian Program dan Tata Usaha

Subbagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan Organisasi Inspektorat I adalah sebagai berikut :



Gambar 3 Bagan Organisasi Inspektorat I

3) Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Inspektorat II terdiri dari :

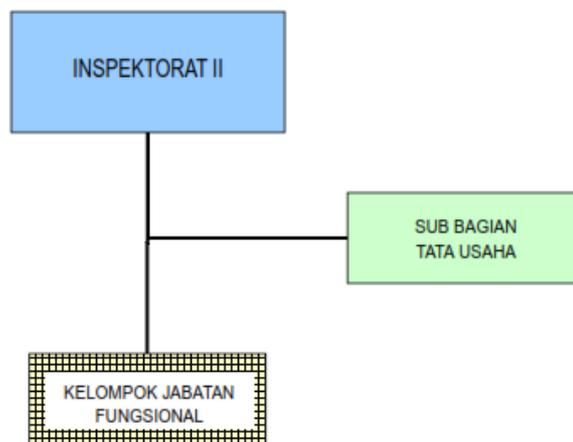
1. Subbagian Program Tata Usaha

Subbagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat II adalah sebagai berikut :



Gambar 4 Bagan Organisasi Inspektorat II

4) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Inspektorat III terdiri dari:

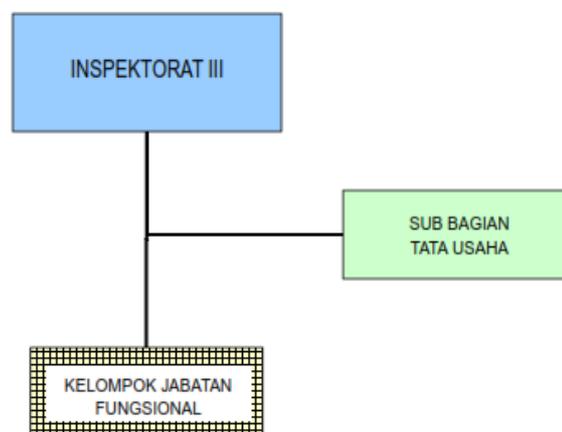
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Subbagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat III adalah sebagai berikut :



Gambar 5. Bagan Organisasi Inspektorat III

5) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Perwakilan Kementerian Perindustrian di Luar Negeri. Inspektorat IV terdiri dari :

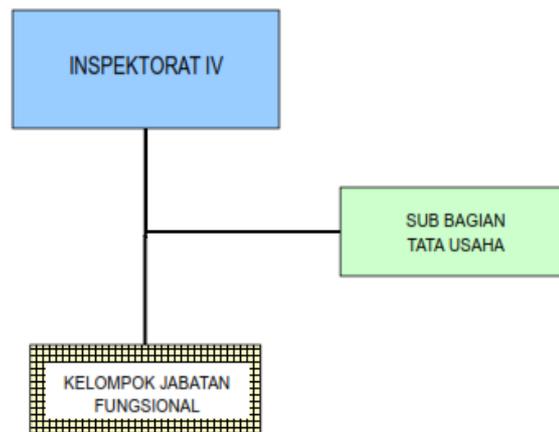
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Subbagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut :



Gambar 6. Bagan Organisasi Inspektorat IV

BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

II.1. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dengan kegiatan pada Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 1. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Perindustrian**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
1	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	- Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas - Layanan Audit Internal	- 7 Laporan - 60 Laporan - 2 Laporan - 1 Layanan
2	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	- Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas - Layanan Audit Internal	- 7 Laporan - 7 Laporan - 2 Laporan - 1 Layanan
3	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	- Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas - Layanan Audit Internal	- 7 Laporan - 55 Laporan - 2 Laporan - 1 Layanan
4	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV	- Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas - Layanan Audit Internal	- 7 Laporan - 7 Laporan - 2 Laporan - 1 Layanan
5	Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	- Layanan Dukungan Manajemen Eselon I - Layanan Sarana dan Prasarana Internal - Layanan Perkantoran	- 1 Layanan - 1 Layanan - 1 Layanan

II.2. Indikator Kinerja Program / Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, Kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	JENIS INDIKATOR	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material eksternal pengawasan	IKU	1,5 %
		Jumlah rekomendasi maksimum hasil	IK	5 %

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	JENIS INDIKATOR	TARGET
		pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti		
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	80 %
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	IKU	91 %
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan Nilai RB area penguatan pengawasan	IK	70 %
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin	IKU	Level 3
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	75 %
		Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian	IK	Level 3 IACM

II.3. Rencana Aksi Program Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Rencana aksi pelaksanaan target kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020 disampaikan pada lampiran dari laporan ini.

II.4. Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, telah di susun Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020, yang menggambarkan sasaran, indikator kinerja, target dan output sebagai berikut :

Tabel 3. Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *) IKU	1,5 %	INSPEKTORAT I <ul style="list-style-type: none"> ▪ Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL ▪ Monitoring dan Evaluasi SAKIP satuan kerja cakupan tugas Insektorat I ▪ Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan ▪ Koordinasi pendampingan/pengawalan kegiatan berisiko tinggi dan Pembinaan Pengawasan Kinerja ▪ Pelaksanaan pendampingan/pengawalan kegiatan berisiko tinggi (Pekerjaan Konstruksi Gedung Pendidikan, Mesit/Peralatan Pendidikan dan pembinaan tenaga kerja/tenaga pendidik ▪ Pelaksanaan pembinaan pengawasan kinerja oleh pimpinan ▪ Reviu LK dan BMN satker Cakupan Tugas Inspektorat I ▪ Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Cakupan Tugas Inspektorat I INSPEKTORAT II

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
				<ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL - Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan (Monev WUB dan Monev DAK) - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi - Pengawasan penyelesaian hibah BMN - Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II - Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan <p>INSPEKTORAT III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL - Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi - Pengawasan penyelesaian hibah BMN - Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III - Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan - Reviu RKBMN <p>INSPEKTORAT IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
				<ul style="list-style-type: none"> - Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi - Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV - Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan - Reviu RKBMN
		Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	5 %	INSPEKTORAT I, II, III, IV <ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja - Audit Khusus - Reviu RKAKL
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80 %	IR I, II, III, IV <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	91 %	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL <ul style="list-style-type: none"> - Pemutakhiran data tindak lanjut - Analisa dan laporan hasil pengawasan - Fasilitasi kegiatan reviu RKAKL - Fasilitasi evaluasi SAKIP - Fasilitasi klinik konsultansi Itjen - Fasilitasi pembinaan bidang pengawasan oleh pimpinan Inspektorat Jenderal ke Satker INSPEKTORAT I, II, III, IV:

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
				<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi area penguatan pengawasan	70 %	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL <ul style="list-style-type: none"> - Forum Koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian (PMPRB) - Penilaian mandiri satuan kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Perindustrian
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *) IKU	Level 3	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian Maturitas SPIP Kemenperin - Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT I, II, III, IV: <ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I, II, III, IV
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75 %	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan penelaahan sejawat INSPEKTORAT I, II, III, IV: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Program Kerja dan Anggaran - Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
				<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi peran pengawasan lainnya cakupan tugas Inspektorat I, II, III, IV
		Capaian IACM Itjen	Level 3 IACM	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan/Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	76 %	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
4	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	10 %	Pengembangan sistem informasi pengawasan dan sinkronisasi dengan sistem Pusdatin
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	50 %	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di lingkungan Inspektorat Jenderal - Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan peraturan di bidang pengawasan - Penyusunan peta proses bisnis Inspektorat Jenderal
		Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70 %	<p>SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi program pengawasan - Penyusunan kebijakan pengawasan - Penyusunan RKAKL Inspektorat Jenderal - Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi <p>INSPEKTORAT I, II, III, IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Program Kerja dan Anggaran

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
				<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas - Koordinasi peran pengawasan lainnya cakupan tugas Inspektorat I, II, III, IV
		Tingkat Perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai	80 %	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan website Inspektorat Jenderal - Pemutakhiran data dan informasi pengawasan - Pengelolaan informasi pengawasan
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	80 %	<ul style="list-style-type: none"> - Analisa beban kerja - Penyusunan Perencanaan pengembangan Kompetensi SDM di lingkungan Inspektorat Jenderal
		Nilai komponen pengungkit penerapan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	90 %	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Aksi pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian
5	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	50%	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sharing knowledge</i> di lingkungan Inspektorat Jenderal
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	50 %	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Assessment</i> kompetensi pegawai itjen - Penyusunan kebutuhan diklat - Koordinasi pelaksanaan diklat dengan BPSDMI - Penilaian angka kredit - Evaluasi prestasi kerja pegawai

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
		Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor	90 %	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pelaksanaan Pemantauan kode etik auditor - Koordinasi pelaksanaan pelayanan, bantuan, dan konsultasi hukum di bidang pengawasan
		Layanan Perkantoran	12 bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Gaji dan Tunjangan - Operasional Perkantoran - Perbaikan tata kelola kearsipan - Perbaikan tata kelola keuangan dan pelaporannya

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

III.1. Hasil yang Telah Dicapai

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 (Januari - Maret) mencapai Rp5.861.728.790,- atau 11,79% dari pagu anggaran sebesar Rp49.724.030.000,-.

Tabel berikut menggambarkan pagu anggaran dan realisasinya sampai dengan TW I tahun 2020 :

Tabel 4. Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan I

Jenis Kegiatan	Target Fisik (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Triwulan I			Sisa Anggaran s.d. Triwulan I	
			Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	%	Jumlah (Rp.)	%
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	33,46	3.400.000.000	27,55	767.733.868	22,58	2.632.266.132	77,42
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	22,19	3.438.717.000	13,45	329.044.102	9,57	3.109.672.898	90,43
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	31,52	3.373.590.000	8,23	493.278.573	14,62	2.880.311.427	85,38
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV	11,13	3.421.785.000	3,31	47.847.318	1,40	3.373.937.682	98,60
Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	18,47	36.089.938.000	15,68	4.223.824.929	11,70	31.866.113.071	88,30
TOTAL	20,13	49.724.030.000	14,31	5.861.728.790	11,79	43.862.301.210	88,21

Capaian tersebut dihitung dari capaian pelaksanaan kegiatan masing-masing Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan uraian sebagai berikut :

a. Inspektorat I

- Realisasi Anggaran Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I Triwulan I Tahun 2020 (Januari-Maret) mencapai Rp767.733.868,- atau sebesar 22,58% dari pagu sebesar Rp3.400.000.000,-.

- Realisasi Fisik Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 (Januari-Maret) sebesar 27,55%.
- Secara lengkap Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Inspektorat I tersaji dalam tabel 6 berikut:

Tabel 5. Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat I Triwulan I

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Triwulan I			s.d. Triwulan I			Sisa Anggaran s.d. Triwulan I	
		Realisasi Fisik	Keuangan (Rp.)	%	Realisasi Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	%	Jumlah (Rp.)	%
Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I	256.800.000	21,87	43.188.900	16,82	21,87	43.188.900	16,82	213.611.100	83,18
Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Inspektorat I	696.752.000	79,27	559.194.730	80,26	79,27	559.194.730	80,26	137.557.270	19,74
Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I	534.100.000	-	0	0,00	-	0	0,00	534.100.000	100
Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Ir I	637.474.000	3,85	17.044.000	2,67	3,85	17.044.000	2,67	620.430.000	97,33
Layanan Audit Internal	1.274.874.000	23,82	148.306.238	11,63	23,82	148.306.238	11,63	1.126.567.762	88,37
Total	3.400.000.000	27,55	767.733.868	22,58	27,55	767.733.868	22,58	2.632.266.132	77,42

b. Inspektorat II

- Realisasi Anggaran Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II Triwulan I Tahun 2020 (Januari-Maret) sebesar Rp329.044.102,- atau sebesar 9,57% dari Pagu sebesar Rp3.438.717.000,-.
- Realisasi Fisik Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II Triwulan I Tahun 2020 (Januari-Maret) sebesar 13,45%.
- Secara lengkap Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat II tersaji dalam tabel 7 berikut:

Tabel 6. Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat II Triwulan I

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Triwulan I			s.d. Triwulan I			Sisa Anggaran s/d Triwulan I	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%)	Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%)	Jumlah (Rp.)	(%)
Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II	590.249.000	25,73	71.543.668	12,12	25,73	71.543.668	12,12	518.705.332	87,88
Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	133.232.000	75,28	67.725.100	50,83	75,28	67.725.100	50,83	65.506.900	49,17
Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II	1.316.005.000	0,59	0	0,00	0,59	0	0,00	1.316.005.000	100
Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Ir II	704.718.000	-	58.544.234	8,31	-	58.544.234	8,31	646.173.766	91,69
Layanan Audit Internal	694.513.000	28,99	131.231.100	18,90	28,99	131.231.100	18,90	563.281.900	81,10
TOTAL	3.438.717.000	13,45	329.044.102	9,57	13,45	329.044.102	9,57	3.109.672.898	90,43

c. Inspektorat III

- Realisasi Anggaran Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III Triwulan I Tahun 2020 (Januari-Maret) mencapai Rp493.278.573,- atau sebesar 14,62% dari pagu sebesar Rp3.373.590.000,-.
- Realisasi Fisik Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I Tahun 2020 (Januari-Maret) sebesar 8,23%.
- Secara lengkap Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Kegiatan Inspektorat IV tersaji dalam tabel 8 :

Tabel 7. Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat III Triwulan I

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran (Rp.)	Triwulan I			s/d Triwulan I			Sisa Anggaran s/d Triwulan I	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	%	Jumlah (Rp.)	%
Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat III	512.270.000	0,95	95.106.000	18,57	0,95	95.106.000	18,57	417.164.000	81,43
Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Inspektorat III	596.247.000	45,52	398.172.573	66,78	45,52	398.172.573	66,78	198.074.427	33,22
Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	575.193.000	0	0	0,00	0	0	0,00	575.193.000	100
Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Ir III	620.150.000	0	0	0,00	0	0	0,00	620.150.000	100
Layanan Audit Internal	1.069.730.000	0,14	0	0,00	0,14	0	0,00	1.069.730.000	100
TOTAL	3.373.590.000	8,23	493.278.573	14,62	8,23	493.278.573	14,62	2.880.311.427	85,38

d. Inspektorat IV

- Realisasi Anggaran Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV Triwulan I Tahun 2020 (Januari-Maret) mencapai Rp47.847.318.- atau sebesar 1,40 % dari pagu sebesar Rp3.421.785.0000,-.
- Realisasi Fisik Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV Triwulan I Tahun 2020 (Januari-Maret) sebesar 5,37 %.
- Secara lengkap Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Inspektorat IV tersaji dalam tabel 9 berikut :

Tabel 8. Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat IV Triwulan I

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran (Rp.)	Triwulan I			s/d Triwulan I			Sisa Anggaran s/d Triwulan I	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	%	Jumlah (Rp.)	%
Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat IV	342.895.000	22,34	19.688.600	5,74	22,34	19.688.600	5,74	323.206.400	81,43
Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Inspektorat IV	250.758.000	-	0	0,00	-	0	0,00	250.758.000	100

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran (Rp.)	Triwulan I			s/d Triwulan I			Sisa Anggaran s/d Triwulan I	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	%	Jumlah (Rp.)	%
Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat IV	823.850.000	0	0	0,00	0	0	0,00	823.850.000	100
Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Ir IV	200.000.000	25,00	25.674.718	12,84	25,00	25.674.718	12,84	174.325.282	87,16
Layanan Audit Internal	1.804.282.000	2,97	2.484.000	0,14	2,97	2.484.000	0,14	1.801.798.000	99,86
TOTAL	3.421.785.000	5,37	47.847.318	1,40	5,37	47.847.318	1,40	3.373.937.682	98,60

e. Sekretariat Inspektorat Jenderal

- Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2020 (Januari-Maret) mencapai Rp4.223.824.929,- atau sebesar 11,70 % dari Pagu sebesar Rp36.089.938.000,-.
- Realisasi Fisik Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2020 (Januari-Maret) sebesar 15,68 %.
- Secara lengkap Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kegiatan tersaji dalam tabel 10.

Tabel 9. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan I

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Triwulan I			s/d Triwulan I			Sisa Anggaran s/d Triwulan I	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	%	Jumlah (Rp.)	%
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	13.227.555.000	4,21	788.708.100	5,96	4,21	788.708.100	5,96	12.438.846.900	94,04
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.097.000.000	0	0	0	0	0	0	1.097.000.000	100
Layanan Perkantoran	21.765.383.000	23,43	3.435.116.829	115,78	23,43	3.435.116.829	15,78	18.330.266.171	84,22
TOTAL	36.089.938.000	15,68	4.223.824.929	11,7	15,68	4.223.824.929	11,70	31.866.113.071	88,30

III.2. Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 diperoleh melalui pencapaian pelaksanaan kegiatan Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan efektif sampai dengan minggu kedua bulan Maret 2020 atau sampai dengan tanggal 13 Maret 2020. Kebijakan *work from home (WFH)* seiring merebaknya wabah COVID-19 yang efektif per tanggal 16 Maret 2020 menyebabkan semua kegiatan Inspektorat Jenderal yang bersifat pengawasan maupun kegiatan pendukungnya dilakukan secara daring.

Kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah terlaksana pada triwulan I dijabarkan sebagai berikut :

1. Kegiatan Audit

Beberapa kegiatan audit kinerja telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 13 Maret 2020. Yaitu, Inspektorat I telah melaksanakan kegiatan audit pada 1 (satu) unit pusat yaitu Sekretariat Jenderal serta 8 unit vertikal, yaitu Poltek STTT Bandung, Poltek AKA Bogor, SMK-SMAK Bogor, BDI Jakarta, BDI Makassar, Poltek AI Makassar, SMK-SMAK Makassar, SMK-SMTI Makassar.

Inspektorat II telah dilaksanakan audit pada 2 (dua) unit pusat yaitu : Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE. Kemudian Inspektorat III telah melaksanakan audit pada 2 (dua) unit pusat yaitu BPPI, Inspektorat Jenderal. Dan Inspektorat IV telah melaksanakan audit pada Ditjen Industri Agro.

Khusus untuk audit pada Inspektorat Jenderal dan Ditjen Industri Agro belum selesai dilaksanakan, karena masih dalam proses konfirmasi dan klarifikasi dari penanggung jawab kegiatan.

Kemudian, dengan pemberlakuan *WFH*, terdapat 6 (enam) kegiatan audit yang tertunda yaitu audit pada SMTI Aceh, PTKI Medan, BBKKP Jogjakarta, BBKB Jogjakarta, Baristand Surabaya, dan BBTPPI Semarang.

2. Kegiatan Reviu

Telah dilaksanakan Reviu Laporan Keuangan/Barang Milik Negara, Reviu PIPK dan Reviu RKA/KL unit cakupan Tugas Inspektorat I, II, III dan IV, dan Reviu Laporan Keuangan BA BUN unit pusat cakupan tugas Inspektorat IV. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan pada triwulan I.

3. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan Inspektorat Jenderal pada tahun 2020 ini adalah :

- a. Monitoring dan evaluasi SAKIP cakupan tugas (Inspektorat I, II, III dan IV);
- b. Monitoring dan evaluasi Diklat Sistem 3 in 1 (Inspektorat I);
- c. Monitoring dan evaluasi Program Penumbuhan Wirausaha Baru /WUB (Inspektorat II);
- d. Monitoring dan evaluasi Kapabilitas Balai Besar dan Baristand Dalam Mendukung Industri 4.0 (Inspektorat III);
- e. Monitoring dan evaluasi Kebijakan Gula Rafinasi Industri Agro (Inspektorat IV);
- f. Monitoring dan evaluasi Kebijakan Industri Garam (Inspektorat IV);
- g. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal (Ses Itjen); dan
- h. Monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas (Ses Itjen).

Sampai dengan akhir triwulan I, hanya monitoring dan evaluasi SAKIP cakupan tugas Inspektorat III yang telah terlaksana. Yaitu melalui pra evaluasi SAKIP unit eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal. Namun demikian belum ada kesepakatan mengenai hasil kegiatan ini dikarenakan adanya perbedaan persepsi antar auditor yang menilai.

4. Kegiatan dukungan manajemen pengawasan
 - a. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja dan SKP untuk seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal telah dilaksanakan pada bulan Januari 2020. Perjanjian kinerja untuk Inspektorat Jenderal terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja. Dokumen Perjanjian kinerja telah disusun sampai dengan level Staf dan PPNPN. Dokumen perjanjian kinerja juga menjadi acuan dalam menyusun dokumen SKP;
 - b. Untuk pengembangan SDM, telah dilaksanakan diklat Auditor Madya, diklat PPNS, *Workshop* telaah sejawat, keikutsertaan dalam diklat infografis dan pelatihan SNI ISO 37001. Diklat Auditor Madya terdiri atas 2 (dua) metode, yaitu secara *online* dan secara tatap muka. Diklat secara *online* telah selesai dilaksanakan. Namun dengan adanya pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak, pelaksanaan diklat secara tatap muka ditunda. Sementara 4 (empat) kegiatan lainnya telah selesai dilaksanakan;

- c. **Penyusunan Pedoman Kenaikan Jabatan Untuk Pejabat Fungsional Auditor**
Menurut rencana, minggu ketiga dan keempat bulan Maret 2020, akan dilaksanakan rapat terkait penyusunan konsep pedoman kenaikan jabatan. Namun dengan adanya pengurangan kegiatan yang bersifat tatap muka, rapat ditiadakan. Sebagai gantinya telah koordinasi dilakukan secara daring dengan membentuk tim Shakti;
- d. **Penyediaan informasi dan koordinasi bidang hukum**
Terkait koordinasi bidang hukum, telah disediakan informasi tentang hukum yang dapat diakses melalui hukumonline.com serta pencetakan informasi hukum dan referensi pengawasan.
Selain itu telah disusun konsep telaah sejawat internal, konsep telaah sejawat eksternal dan penyusunan Permenperin Tentang Evaluasi SAKIP Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Pada bulan Januari dan Februari, telah dilaksanakan rapat dan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Biro Hukum terkait penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Hambatan yang dihadapi adalah dalam penyusunan Permenperin ini memerlukan koordinasi tatap muka dengan Biro Hukum karena permenperin ini tidak dikonsepsikan dalam penyusunan progsun Kementerian. Dengan adanya kebijakan *WFH*, maka hal ini tidak dapat dilakukan, oleh karena itu evaluasi atas implementasi SAKIP unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2020 masih menggunakan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 93 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang akan segera diperbaiki;
- e. **Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**
Pada triwulan I ini, telah dilaksanakan pembahasan terkait saldo rekomendasi hasil pengawasan untuk unit Dekonsentrasi dan tindak lanjut hasil audit kinerja BPK atas PDDT KEK Sei Mangkei. Selain itu juga telah dilaksanakan rapat koordinasi pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan satuan kerja yang bersifat BLU dengan mengundang Kantor Akuntan Publik (KAP). Rapat ini bertujuan untuk memastikan KAP telah menyelesaikan audit pada satker BLU sebelum waktu pemeriksaan BPK. Permasalahan yang terjadi yaitu data

tindak lanjut tidak dapat diperbarui/*diupdate* dengan segera karena aplikasi Tindak Lanjut tidak dapat diakses;

- f. Rapat persiapan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan serta telah dibentuk tim asesor. Dengan penerapan *WFH* koordinasi terus dilakukan secara daring;
- g. Kegiatan pada sub bagian keuangan merupakan kegiatan yang bersifat rutin berupa layanan bulanan. Adanya kebijakan *WFH*, tidak menghambat proses administrasi dan pengajuan keuangan, karena telah sub bagian keuangan telah menyusun jadwal sedemikian rupa sehingga proses tetap berjalan normal;
- h. Pra evaluasi SAKIP unit eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal telah mulai dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Maret 2020 secara *online*. Masing-masing unit kerja mengirimkan dokumen akuntabilitas ke auditor yang ditunjuk oleh Inspektur III. Hal-hal yang menjadi catatan auditor antara lain terdapat indikator penilaian yang mengharuskan dokumen akuntabilitas untuk diunggah di *website* resmi unit kerja, dan adanya dasar hukum terkait pemberian *reward* dan *punishment* atas capaian kinerja. Sementara ini hasil pra evaluasi belum diketahui hasilnya karena masih memerlukan rapat pleno antar auditor;
- i. Penyusunan Laporan Kinerja unit eselon II dan eselon I Inspektorat Jenderal Tahun 2019 dan Laporan APIP 2019.

III.3. Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal dipandang dari masing-masing perspektif, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perspektif Pemangku Kepentingan

1. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja :

- Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal (Indikator Kinerja Utama/IKU)

Materialitas temuan BPK, membandingkan antara jumlah nilai uang temuan BPK dengan nilai realisasi anggaran Kementerian Perindustrian. Pada triwulan I ini realisasi belum dapat diukur karena saat ini BPK melakukan

proses pemeriksaan. Capaian dari indikator ini diharapkan mampu dilaporkan pada triwulan IV.

- Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti

Indikator ini diukur dari hasil evaluasi yang tertuang dalam Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut (BAPTL) yang kemudian ditetapkan dalam Surat Ketetapan Inspektur Jenderal tentang Rekomendasi Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti. Pada inspektorat II, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan I dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai yaitu hasil audit pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) yang berjumlah 10 temuan. Namun belum dapat diukur dikarenakan belum dapat diketahui berapa jumlah temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti (cacat temuan).

- Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti. Target dari indikator ini adalah 80%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan I belum dapat diukur dikarenakan belum ada konsultasi dan/atau pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat II.
- Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker (IKU). Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker (dengan status SR dan BSR). Target dari indikator ini 91 %, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan I belum dapat diukur karena belum ada rekomendasi yang ditindaklanjuti sampai dengan laporan ini dibuat.

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Indikator kinerja :

- Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi area penguatan pengawasan. Untuk indikator ini belum dapat diukur pada triwulan I. Kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I adalah koordinasi terkait metode pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 dimana masih menunggu petunjuk teknis dari KemenPAN & RB.
- Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU). Untuk indikator ini belum dapat diukur pada triwulan I, karena penilaian baru akan dilaksanakan pada Triwulan III atau IV.

Perspektif Proses Bisnis Internal

3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif. Indikator kinerja :
- Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan. Indikator ini belum dapat diukur pada triwulan I, karena kegiatan pemantauan dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan pengawasan belum dilaksanakan.
 - Level Kapabilitas APIP. Indikator ini diukur berdasarkan hasil penilaian BPKP.
 - Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK). Penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKAKL. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang telah selesai dan memenuhi kriteria tersebut adalah Audit pada Ditjen IKMA. Sehingga capaian realisasi kinerjanya pada Triwulan I adalah 25% (1 dari 4 kegiatan audit yang sudah dilaksanakan Inspektorat II).

Perspektif Kelembagaan

4. Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang Efektif dan Efisien. Indikator kinerja :
- Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor. Indikator ini dinilai berdasarkan pada pembangunan sistem informasi pengawasan dimana auditor dapat mengakses data dan informasi di dalamnya untuk keperluan audit, dengan target 10%. Indikator ini belum dapat diukur pada triwulan I.
 - Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Indikator ini belum dapat diukur pada triwulan I.
 - Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT.
Rencana aksi pada triwulan I ini belum dapat terpenuhi dari target total 70% , karena realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan I adalah 21,7% (Inspektorat II) yang dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai dengan PKPT yang telah disusun. Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang sesuai dengan PKPT (kesesuaian Surat Tugas dengan +/- 14 hari dari jadwal yang tertera di PKPT) pada Triwulan I adalah pelaksanaan audit di Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE, dan pelaksanaan Reviu LK/BMN Semester II TA 2019 pada Ditjen ILMATE,

Ditjen IKMA, dan BPIPI Sidoarjo, yaitu 5 dari 23 jenis kegiatan Inspektorat II dalam PKPT.

- Persentase Tingkat perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai. Indikator ini diukur dari persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan dengan jumlah permintaan data yang masuk.
- Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya. Yaitu kesesuaian peran pengawasan auditor dengan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) terakhir yang dimiliki (utama/madya/muda). Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Inspektorat II ada 5, yaitu Reviu LKBMN pada Ditjen ILMATE (2 orang tidak sesuai peran), Reviu LKBMN pada Ditjen IKMA (2 orang tidak sesuai peran), Reviu LKBMN pada BPIPI Sidoarjo (1 orang tidak sesuai), Audit Tematik pada Ditjen IKMA (3 orang tidak sesuai peran), dan Audit Tematik pada Ditjen ILMATE (3 orang tidak sesuai peran). Sehingga capaian realisasi kinerjanya pada Triwulan I adalah 26,8 % (11 yang tidak sesuai peran penugasan dari 41 yang ditugaskan pada 5 kegiatan diatas).
- Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen berdasarkan *self-assessment*. Indikator ini belum dapat diukur pada triwulan I.

5. Terwujudnya APIP yang professional dan berintegritas. Indikator kinerja :

- *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan. Indikator ini merupakan refleksi dari jumlah sharing knowledge/PKS yang diadakan dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan diklat substansi pengawasan. Pada tahun 2020 ini memiliki target 50%. Pada triwulan I, indikator ini belum dapat diukur.
- Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal.
- Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor. Indikator ini dihitung dengan adanya aduan terkait pelanggaran kode etik, tahun ini memiliki target sebesar 90%. Pada triwulan I, indikator ini belum dapat diukur.
- Layanan Perkantoran dengan target 12 bulan layanan. Sampai dengan triwulan I, telah terlaksana 3 bulan layanan perkantoran.

Tabel 10. Capaian Kinerja

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Pelaksanaan Program Triwulan I TA 2020	Realisasi Triwulan I TA 2020
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1.	Terwujudnya Efektivitas, dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *) IKU	1,5 %	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja - Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV - Audit Tematik sesuai dengan Kebijakan Pengawasan IR I-IV 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester II TA. 2019 dan serta Laporan Keuangan BA BUN Semester II TA. 2019 unit pusat cakupan tugas Inspektorat IV. - Pelaksanaan Reviu PIPK TA. 2019 unit pusat cakupna tugas Inspektorat IV. - Sedang berlangsung Audit Kinerja pada Direktorat Jenderal Industri Agro yang pada akhir Maret 2020 sudah masuk dalam tahap klarifikasi dari Penanggung Jawab Ditjen Industri Agro. - Reviu Laporan Keuangan atas Laporan Keuangan BMN Ditjen KPAIL, IKFT, Industri Agro dan Pusat P3DN Semester II TA 2019 - Reviu Laporan Keuangan Belanja Subsidi Kemenperin (BA BUN BMDTP) di Ditjen Agro dan IKFT Semester II TA 2019.
		2. Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	2 %	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Jenderal sebanyak - Satuan Kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan 	Penghitungan indikator ini belum dapat dilaksanakan terkait
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	-	-

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Pelaksanaan Program Triwulan I TA 2020	Realisasi Triwulan I TA 2020
		4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91%		IR I: - Pelaksanaan di Triwulan II IR III: - Pemutakhiran data terkait program/data kegiatan pada BBIA Bogor, BBPK Bandung, BBK Bandung, BBLM Bandung, BBKPP Jogjakarta, BBKB Jogjakarta, BBTPPI Semarang, BBIHP Makassar, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Surabaya
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan	70 %	- Pembentukan tim PMPRB	Koordinasi dalam rangka pelaksanaan PMPRB telah dilaksanakan secara online untuk membahas mekanisme pelaksanaan PMPRB pada tahun 2020.
		2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *) IKU	Level 3	-	Kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan III
PROSES BISNIS INTERNAL					
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	1. Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75 %	- Pembahasan Draft Konsep Kebijakan Pengawasan dengan Biro Hukum dan AAPI	- Pembahasan standar pelaksanaan pengawasan telah dilakukan dan akan segera disusun metode pelaksanaan untuk mengukur kinerja ini
		2. Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	- Koordinasi dalam dengan unit eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal	- Koordinasi dalam dengan unit eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal telah untuk membahas penanggung jawab masing-masing aspek.

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Pelaksanaan Program Triwulan I TA 2020	Realisasi Triwulan I TA 2020
		3. Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	76	Kegiatan ini dilakukan setiap kali kegiatan audit	- Belum dapat diukur
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	1. Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	10 %	-	-
		2. Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	50 %	- Koordinasi Penyusunan SOP - Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan	- Telah disusun konsep Permenperin tentang evaluasi SAKIP dan sedang dibahas dengan Biro Hukum
		3. Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70 %	-	IR I: - Pelaksanaan reviu LKBMN, 2 satker pusat dan 29 satker vertical, yaitu 13 vokasi, 9 SMK, dan 7 BDI cakupan tugas Inspektorat I - Reviu PIPK satker Pusat (Sekjen & BPSDMI) dan 3 satker vertical yaitu Poltek STMI Jakarta, Poltek APP Jakarta dan BDI Jakarta. - Audit Kinerja Pusat (Sekretariat Inspektorat Jenderal) dan Audit Vertikal 8 Satker, yaitu Poltek STTT Bandung, Poltek AKA Bogor, BDI Jakarta, BDI Makassar, Poltek AI Makassar, SMK-SMAK Makassar, SMK-SMTI Makassar. - Capaian Kinerja sebanyak 25% dan kegiatan masih berlanjut pada triwulan berikutnya.

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Pelaksanaan Program Triwulan I TA 2020	Realisasi Triwulan I TA 2020
					<p>IR III:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada PKPT, terdapat 34 kegiatan pengawasan yang seharusnya dilaksanakan. Pada pelaksanaannya telah dilaksanakan 30 kegiatan pengawasan hingga minggu kedua bulan Maret. Kegiatan yang tidak terlaksana adalah Audit Kinerja pada BBKKP Jogjakarta, BBKB Jogjakarta, BBT PPI Semarang, dan Baristand Surabaya. (Capaian Kinerja 20,82%) - Reviu Laporan Keuangan dan BMN tahun 2019 satuan kerja cakupan Inspektorat III telah dilaksanakan pada seluruh satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III, yaitu Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Penelitian Industri beserta unit kerja vertikalnya (BBKK Jakarta, BSI Jakarta, BBK Bandung, BBT Bandung, BBPK Bandung, BBLM Bandung, BBKB Jogjakarta, BBKKP Jogjakarta, BBBBT Bandung, BBIA Bogor, BBT PPI Semarang, BBIHP Makassar, BPPSI Pekanbaru, Baristand Industri Pontianak, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Surabaya, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Samarinda, Baristand Industri Manado, Baristand Industri Ambon). Kegiatan dilakukan dari tanggal 27 Januari hingga 21 Februari 2020.

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Pelaksanaan Program Triwulan I TA 2020	Realisasi Triwulan I TA 2020
		4. Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai	80 %	- Penyediaan data dan informasi terkait pengawasan	- Belum dapat dilaksanakan
		5. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80 %	- Mengevaluasi pelaksanaan penugasan dengan jadwal yang telah ditetapkan 30 %	IR I: <ul style="list-style-type: none"> Reviu PIPK & LKBMN dan Audit Pusat (Sekretariat Inspektorat Jenderal) dan Audit Vertikal 8 satker dengan penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan capaian kinerja 25% dan kegiatan masih berlanjut pada triwulan berikutnya.
		6. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	90 %	-	-
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	1. <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	50%	- Pelaksanaan PKS atas keikutsertaan diklat substansi	
		2. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	50 %	- Keikutsertaan pada diklat	
		3. Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor	90%	-	- Pada triwulan I, kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan terkait pelaksanaan
		4. Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	- Pengadaan Fasilitas Perkantoran akan	- Pemberian Gaji dan Tunjangan telah dilaksanakan setiap bulannya dari Januari-Maret 2020

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Pelaksanaan Program Triwulan I TA 2020	Realisasi Triwulan I TA 2020
				<ul style="list-style-type: none"> dilaksanakan pada bulan Januari - Pemberian Gaji dan Tunjangan akan dilaksanakan setiap bulan - Pembiayaan Operasional dan Pemeliharaan kantor akan dilaksanakan setiap bulan - Pelaksanaan FGD Pra Penyusunan Pagu Anggaran pada bulan Agustus - Pelaksanaan Workshop Penyusunan RKAKL DIPA pada bulan Juli - Pelaksanaan Pembahasan Hasil Reviu RKAKL 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pembiayaan Operasional dan Pemeliharaan kantor TW I

III.4. Hambatan dan Kendala

Pada Triwulan I Tahun 2020, terdapat beberapa *output* (keluaran) Inspektorat Jenderal yang belum sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini disebabkan antara lain karena :

1. Terdapat kebijakan *Work From Home* sejak tanggal 16 Maret 2020 sebagai langkah pencegahan pandemi virus COVID-19 sehingga ada sebagian pelaksanaan pengawasan dan non pengawasan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal;
2. Adanya perubahan aturan pada Standar Biaya Masukan (SBM) TA. 2020 dimana kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada kompleks perkantoran yang sama tidak mendapatkan Uang Harian, sehingga Realisasi Keuangan Inspektorat IV masih sedikit walaupun Realisasi Fisik sudah tinggi;
3. Inspektorat IV mengalami kekurangan tenaga administrasi di Sub Bagian Program dan Tata Usaha, sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan belum dapat diajukan pertanggungjawaban keuangannya;
4. Aplikasi Tindak Lanjut dan *website* Inspektorat Jenderal masih dalam tahap *maintenance* (sudah hampir 1 bulan) dan mengakibatkan tidak terlaksananya update data dan terhambatnya penyediaan data;
5. Terdapat penugasan lain dari pimpinan yang menyebabkan perubahan jadwal kegiatan yang berdampak pada tidak tercapainya target fisik.

III.5. Langkah Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari adanya kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk segera mengatasi kendala penginputan SPTJB pada tahun anggaran 2020;
2. Melakukan revisi terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk menyesuaikan dengan kebijakan *Work from Home* sehingga realisasi kinerja dan fisik tetap optimal;
3. Melakukan revisi anggaran sebagai upaya mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
4. Seluruh pegawai Inspektorat Jenderal agar tetap mematuhi kebijakan

Work from Home sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19 yang hingga terbitnya laporan ini belum ditemukan obatnya.

5. Berkoordinasi dengan bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal guna mempercepat pengalokasian SDM untuk membantu pekerjaan administrasi di Sub Bagian Program dan Tata Usaha Inspektorat IV.

BAB IV PENUTUP

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 (Januari - Maret) mencapai Rp5.861.728.790,- atau 11,79% dari total pagu anggaran sebesar Rp49.724.030.000,-. Angka-angka capaian kinerja kegiatan tersebut merupakan nilai tertimbang dari kemampuan penyerapan anggaran dan pencapaian realisasi fisik dari total anggaran yang ada pada Inspektorat Jenderal.

Terkait dengan merebaknya pandemi COVID-19, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang di dalamnya menyatakan bahwa anggaran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dialokasikan untuk mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta mempercepat *refocussing* kegiatan dari realokasi anggaran melalui revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

Untuk itu, diharapkan Informasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana pada triwulan berikutnya dalam rangka pencapaian target kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020.

Tabel 11. Progres Capaian Rencana Aksi TW I

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW I	Keterangan
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *) JIKU	1.5 %	- IR I, II, III, IV - Belum dapat diukur, BPK belum selesai melakukan pemeriksaan	
		2. Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	2 %	- IR I, II, III, IV - Belum dapat diukur, pelaksanaan di Triwulan III	
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	- IR I, II, III, IV - Belum dapat diukur, Pelaksanaan di Triwulan II	
		4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	91%	- IR I,II, III, IV - Belum dapat diukur, pelaksanaan di Triwulan II	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan	70 %	- Belum dapat diukur	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW I	Keterangan
		2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level 3	<ul style="list-style-type: none"> - IR I, II, III, IV - Belum dapat diukur, pelaksanaan di Triwulan II 	
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	<ul style="list-style-type: none"> - IR I: 15,30% ; Satker yang di audit telah memenuhi standar - IR II: Belum dapat diukur - IR III: reuiu PIPK dan reuiu LK-BMN satker cakupan tugas, dan audit BPPI Pusat (20%) - IR IV: 100% telah tercapai; Seluruh pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan. 	
		2. Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan unit eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal 	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW I	Keterangan
		3. Penerepan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	76 %	<ul style="list-style-type: none"> - IR I: Belum dapat diukur - IR II: 1 Kegiatan audit dari 4 kegiatan telah dilaksanakan (25%) - IR III: 20% - IR IV: 100% (Telah tercapai) ; Pada pelaksanaan Audit Kinerja pada Ditjen Industri Agro, Tim Audit telah menggunakan 5 aplikasi, yaitu SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, dan RKAKL. 	
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	1. Sistem Informasi pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	10 %	- Belum dapat diukur	
		2. Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	50 %	- Belum dapat diukur	
		3. Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%	<ul style="list-style-type: none"> - IR I: 25%;Reviu LKBMN, Reviu PIPK, Audit Kinerja satker Pusat (Set Itjen) & Audit Vertikal 8 satker - IR II: 21,7% yaitu 5 dari 23 jenis kegiatan Inspektorat II sesuai dengan PKPT - IR III: 20,82% 	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW I	Keterangan
				- IR IV: 55%; Dari 20 Rencana Penugasan sesuai dengan PKPT 2020, terdapat 11 Penugasan yang sesuai dengan PKPT, dan 9 yang tidak sesuai.	
		4. Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai	80%	- Belum dapat diukur	
		5. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	- IR I: 25%;Reviu LKBMN, Reviu PIPK, Audit Kinerja satker Pusat (Set Itjen) & Audit Vertikal 8 satker - IR II: 26,8% yaitu 11 yang tidak sesuai peran penugasan dari 41 yang ditugaskan pada 5 kegiatan - IR III: 20% - IR IV: 100% (Telah tercapai); Dari seluruh Penugasan yang telah dijalankan oleh Inspektorat IV pada Triwulan I, seluruh SDM pengawasan telah menjalankan tugas sesuai dengan peran yang seharusnya.	
		6. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	90%	- Belum dapat diukur	
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	1. <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	50 %	- Masih dalam tahap pelaksanaan sehingga belum dapat diukur	
		2. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	50 %	- Masih dalam tahap pelaksanaan jadi belum dapat diukur	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW I	Keterangan
		3. Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor	90%	- Belum dapat diukur	
		4. Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	- 3 bulan layanan	

Keterangan :



: Telah tercapai;



: Dalam proses pelaksanaan



: Tidak tercapai